

Dinamika Administrasi

Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen

Volume 1 Nomor 1. Oktober 2018

Dinamika Administrasi ; Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen (DJAM) merupakan jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel orisinal mengenai ilmu pengetahuan, penelitian atau penelitian terapan dan perkembangan lainnya di bidang Ilmu Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, dan rumpun Keilmuan Manajemen. DJAM diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun (Oktober dan April). Target pembaca utamanya adalah peneliti, akademisi, mahasiswa, praktisi dan kalangan lainnya yang tertarik dengan isu Administrasi dan Manajemen

EDITOR IN CHIEF

Antonius Galih Prasetyo

(Lembaga Administrasi Negara)

EDITORIAL BOARD

Sarpan

(Universitas Wijaya Putera Surabaya)

Rangga Restu Prayogo

(Universitas Negeri Medan)

Alizar Isna

(Universitas Jenderal Soedirman)

Vincentia Ananda

(Unika Soegijapranata)

Ertien Rining Nawangsari

(UPN “Veteran” Jawa Timur)

David Laiyan

(Universitas Musamus Merauke)

Rima Ranintya Yusuf

(STIA LAN Jakarta)

DAFTAR ISI

Dinamika Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Volume 1 Nomor 1. Oktober 2018

POTENSI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI JAWA TIMUR. SEBUAH STUDI TENTANG SOCIAL CAPITAL SEBAGAI SUSTAINABLE RESOURCES Arimurti Kriswibowo.....	1
PEMANFAATAN LAPORAN AKUNTANSI PADA UMKM GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM DI JAWA TIMUR Riko Setya Wijaya.....	15
PENGARUH EARNING PER SHARE DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI WOOD AND LUMBER YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007 Ahmad Gamal.....	27
ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA Cholid Fadil.....	41
PENANAMAN INTERNAL BRANDING DALAM MEMBANGUN BRAND COMMITMENT Siti Ning Faridah dan Nurul Azizah.....	56
THE INTERNET ADDICTION: CHALLENGES TIO CONFLICT SETTLEMENT IN FAMILY COMMUNICATION Roziana Febrianita dan Kusnarto.....	70
PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN STRES KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PDAM KAB.SIDOARJO Rina Indra Sabella.....	80

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA

Cholid Fadil

Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur
Jalan Raya Rungkut Madya, Surabaya, 60293

ABSTRAK (12 pt bold)

Dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang lebih dominan dalam mengatur perberasan nasional. Setelah terjadinya swasembada beras pada tahun 1984 yang mengakibatkan produksi beras dalam negeri berkurang pada setiap tahunnya sehingga menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras dari luar negeri. Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Impor Beras di Indonesia. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dipergunakan adalah variabel Jumlah Penduduk, Produktivitas, Harga Beras Lokal, Harga Beras Internasional, dan Impor Beras sebagai variabel terikat. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu times series yang diambil selama 15 tahun. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah regresi linier berganda menggunakan Uji F dan Uji t. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Jumlah Penduduk, Produktivitas, Harga Beras Lokal, dan Harga Beras Internasional berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia dan telah teruji kebenarannya. Sedangkan hasil Uji T, secara parsial hanya variabel bebas Jumlah Penduduk yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Hal ini disebabkan meskipun Jumlah Penduduk mengalami peningkatan atau penurunan tidak mempengaruhi Jumlah Impor Beras di Indonesia. Sedangkan variabel Produktivitas, Harga beras Lokal dan Harga Beras Internasional yang berpengaruh nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Dari keempat variabel tersebut yang menunjukkan variabel paling dominan terhadap Impor Beras di Indonesia adalah variabel Harga Beras Internasional.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Produktivitas, Harga Beras Lokal, Harga Beras Internasional Impor Beras

PENDAHULUAN

Pendahuluan Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Sebagai makhluk bernyawa, tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya untuk berkembang biak dan bermasyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup merupakan salah satu penentu bagi perwujudan ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhannya agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Penghayatan masyarakat Indonesia atas pentingnya pemantapan ketahanan pangan bagi pembangunan bangsa telah muncul sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penghayatan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berintikan amanat untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, dimana kecukupan pangan menjadi salah satu pilar utamanya (Suryana, 2003 : 241).

Bagi Indonesia beras memiliki peran yang sangat strategis, politis, ekonomis sekaligus memiliki nilai sensitif karena mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. Beras menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak menjadi urusan pemerintah semata. Sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang lebih dominan dalam mengatur perberasan nasional. Peran beras yang sangat khusus menjadi alasan utama keterlibatan atau campur tangan berbagai kelembagaan terhadap masalah perberasan. Beberapa pihak yang terlibat merupakan pemangku kepentingan perberasan yang utama, memiliki kewajiban sekaligus mendapat tugas untuk dapat menyampaikan dan menyalurkan aspirasi kepentingan konstituen yang diwakilinya. Pemerintah berkewajiban menyediakan beras sebagai makanan pokok masyarakat dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi, di pihak lain pemerintah juga harus memberi perlindungan kepada petani dengan harga yang layak. Organisasi tani menginginkan kebijakan beras yang adil dan tidak merugikan kepentingan petani pada pelaksanaan instrumen kebijakan perberasan. Asosiasi atau organisasi pengusaha beras menginginkan harga yang stabil, memberi nilai tambah keuntungan dan tidak dirugikan dalam menjalankan usahanya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kepentingan yang lebih luas dan berkewajiban memberi perlindungan dan kontrol politik terhadap beberapa instrumen pelaksanaan kebijakan perberasan di Indonesia.

Kebijakan pada periode pertama telah dianalisis berbagai pihak dimana strategi pembangunan perberasan pada masa revolusi hijau adalah memperkenalkan teknologi baru dalam bentuk varietas unggul, perbaikan pengelolaan sistem pengairan, penggunaan pupuk kimia, sistem pemasaran yang lebih baik serta pembangunan irigasi. Subsidi pupuk, harga beras yang stabil, air irigasi tanpa bayar, jalan yang lebih baik, kondisi makro ekonomi yang stabil melengkapi pengenalan teknologi baru dan merangsang penyebaran teknologi tersebut secara cepat. Hal tersebut telah mampu mengatasi kendala-kendala ekonomi yang ada, memungkinkan terjadinya peningkatan produksi dan pendapatan dari sektor perberasan menjadi tiga kali lipat (Sawit, 2006).

Selama krisis ekonomi, strategi perberasan tidak lagi tersusun dengan baik. Strategi perberasan ditujukan untuk membantu meningkatkan pendapatan petani dalam situasi harga dunia yang luar biasa rendahnya. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada strategi

kali ini tidak ada teknologi baru yang disebarakan. Saat ini hampir seluruh petani padi Indonesia telah menggunakan varietas unggul. Beban berat negara dalam penyediaan anggaran saat ini yang berakibat pada ketatnya belanja negara, telah menghambat kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sarana irigasi dan transportasi. Terganjil oleh keterbatasan fiskal, kebijakan yang kontradiktif serta beban yang timbul dari korupsi dan “salah urus” pertanian Indonesia. Bulog tidak mampu menstabilkan harga beras, turunnya nilai tukar rupiah yang besar dalam waktu singkat telah meningkatkan ketidakpastian produksi dan pemasaran beras. Instrumen kebijakan utama yang dilakukan saat ini adalah penerapan tarif bea masuk impor yang telah meningkatkan harga beras di dalam negeri, serta subsidi konsumsi beras terbatas bagi kelompok miskin di perdesaan dan perkotaan melalui program “raskin” (Pearson, et al. 2005).

Selama krisis ekonomi, strategi perberasan tidak lagi tersusun dengan baik. Berbeda dengan masa 1970-1980-an, pada strategi saat ini tidak ada teknologi baru yang disebarakan (Pearson, et.al. 2005). Regulasi di bidang pangan dan perberasan nasional bermuara dari pemerintah melalui Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Perum Bulog. Ketersediaan pangan, khususnya beras terdiri atas produksi, net import (impor dikurangi ekspor) dan perubahan stok. Pemerintah bertugas melaksanakan kebijakan perberasan mulai dari aspek produksi sampai pasca produksi. Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama masyarakat. Pemerintah menyusun norma-norma, standar, prosedur, monitoring, evaluasi, supervisi, fasilitas dan urusan eksternal di bidang pangan nasional (DKP, 2006).

Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, pasal satu ayat 17 yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau. UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Sementara pada Word Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan pada setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu demi

keperluan hidup yang sehat dengan prasyarat penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (DKP, 2006).

Implikasi kebijakan dari konsep UU nomor 7 tahun 1996 adalah bahwa pemerintah di satu pihak, berkewajiban menjamin kecukupan pangan khususnya beras dalam arti jumlah dengan mutu yang baik serta stabilitas harga dan di pihak lain peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya dari golongan berpendapatan rendah. Hal inilah yang menjadi peran utama pemerintah dalam mengatur regulasi instrumen kebijakan perberasan dalam bentuk kebijakan publik. Mustopadidjaja (1992) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan untuk mengatasi masalah tertentu, kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang secara formal dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara Budiharsono (2003) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh kelompok politik yang mempunyai kekuasaan untuk membangun masyarakat yang ingin dicapai bersama. Kebijakan perberasan merupakan produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan sasaran semua warga negara. Kebijakan perberasan yang tepat adalah ketika kebijakan perberasan didasari oleh pertimbangan konsekuensi politik yang ditimbulkan dan memberi dampak positif bagi semua pihak yang menjadi sasaran keputusan politik tersebut.

Pertumbuhan laju penduduk yang tinggi setiap tahun, sementara lahan semakin sempit, dikhawatirkan menimbulkan kekurangan pangan khususnya beras di dalam negeri. Pearson, et.al. (2005) mengemukakan bahwa beberapa puluh tahun ke depan beras masih menjadi bahan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Sementara laju pertumbuhan produksi masih relatif rendah (0,82%) selama periode tahun 2000-2005. Peningkatan produksi jika dibandingkan dengan laju kebutuhan relatif sangat kecil, hal ini disebabkan terbatasnya penerapan teknologi, penurunan kapasitas produksi khususnya di Jawa sebagai kontributor terbesar beras nasional.

Produksi beras Indonesia sejak Pelita pertama (akhir 1960-an) hingga tahun 2000 terus mengalami peningkatan, walaupun tahun-tahun tertentu ada penurunan produksi dan bahkan pada tahun 1984 mencapai swasembada beras. Menurut Suryana et.al. (2001), pada tahun 1990 hingga 1991 volume produksi berada di bawah kebutuhan konsumsi beras domestik dan pada tahun 1992 sampai dengan pertengahan 1993 produksi meningkat hingga melebihi kebutuhan pasar dalam negeri. Tahun 1994-1995 produksi

kembali berkurang dan pada tahun 1996 meningkat kembali sampai melebihi kebutuhan dalam negeri. Tahun 1997 produksi merosot sebesar 3,4 persen akibat iklim musim kering yang panjang (El Nino). Tahun 1998, pada saat krisis ekonomi, Indonesia juga mengalami krisis beras yang ditandai dengan kelangkaan artifisial sehingga harga beras tinggi. Produksi tertinggi periode 1990-2000 terjadi tahun 2000 mencapai 29,1 juta ton yang disebabkan cuaca yang mendukung setelah tahun sebelumnya mengalami gangguan El Nino. Sekitar 56% dari total produksi nasional berada di Pulau Jawa selebihnya tersebar di Sumatera (22%), Sulawesi (10%), Kalimantan lima persen dan tujuh persen tersebar di daerah lainnya.

Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 menyebutkan bahwa perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui peran DKP serta difungsikan merumuskan kebijakan strategis (kebijakan impor, subsidi, harga, cadangan pangan dan raskin). Khusus untuk pembangunan perberasan nasional pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 13 tahun 2005 tentang kebijakan perberasan yang mewajibkan kementerian terkait untuk melaksanakan upaya peningkatan pendapatan petani melalui pemberian dukungan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas, diversifikasi usaha dan pengembangan pasca panen, kebijakan harga, kebijakan ekspor dan impor beras, penyaluran beras bersubsidi dan pengelolaan beras nasional (DKP, 2006).

Beberapa kebijakan untuk tercapainya ketersediaan beras dilihat dari beberapa aspek adalah sebagai berikut: (1) Aspek ketersediaan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan; pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan; peningkatan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pengelolaan cadangan beras pemerintah dan masyarakat; (2) Aspek distribusi diarahkan pada efisiensi distribusi dan perdagangan; mengurangi atau menghilangkan Perda yang menghambat distribusi antar daerah; mengembangkan kelembagaan dan sarana fisik pengolahan dan pemasaran, menyusun kebijakan harga untuk melindungi produsen dan konsumen; (3) Aspek konsumsi diarahkan pada meningkatkan kemampuan akses rumah tangga sesuai kebutuhan dari segi jumlah, mutu, keamanan dan keseimbangan gizi; mendorong, mengembangkan dan memfasilitasi peranserta LSM, organisasi profesi dan organisasi massa dalam memenuhi hak atas pangan dan mempercepat diversifikasi pangan ke arah konsumsi beragam dan bergizi (DKP, 2006).

Elemen penting di dalam kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah adalah pengembangan lahan abadi 15 juta ha beririgasi dan 15 juta ha lahan kering, pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan, pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai, pengembangan dan penyediaan benih, bibit unggul dan alsintan, pengaturan pasokan gas untuk produksi pupuk, pengembangan skim permodalan bagi petani, peningkatan produktivitas melalui perbaikan genetis dan teknologi budidaya, peningkatan efisiensi penanganan pasca panen dan pengolahan, penyediaan insentif investasi di bidang pangan dan penguatan penyuluh serta kelembagaan petani (DKP, 2006).

Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Masalah beras bukan hal yang sederhana dan sangat sensitif sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan perberasan akan berdampak tidak saja pada kondisi perberasan nasional tetapi juga pada berbagai bidang lain yang terkait. Oleh sebab itu dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi perberasan nasional.

Peranan beras yang sangat khusus merupakan salah satu alasan penting campur tangan pemerintah terhadap perberasan masih dilakukan. Kadar campur tangan pemerintah dapat berubah setiap saat karena perubahan peranan unsur-unsur di atas. Namun melepaskan sama sekali campur tangan pemerintah dalam perberasan nasional belum pernah dilakukan karena resikonya sangat besar. Campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perberasan baik yang menyangkut aspek pra produksi, proses produksi, serta pasca produksi. Salah satu lembaga pangan yang diberi tugas pemerintah untuk menangani masalah pasca produksi, khususnya dalam bidang harga, pemasaran dan distribusi adalah Badan Urusan Logistik (Bulog).

Lembaga seperti Bulog telah ada sejak zaman sebelum penjajahan Belanda, saat penjajahan Belanda yang dikenal sebagai VMF, masa penjajahan Jepang yang dikenal sebagai Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha, atau juga pada zaman kemerdekaan yang banyak mengalami perubahan sejak dari PMR, BAMA, YUBM, BPUP (Badan Pelaksana Urusan pangan), Kolognas dan Bulog. Tugas dan fungsi lembaga pangan tersebut

umumnya berkisar pada masalah pengendalian harga, distribusi dan pemasaran. Hanya fokus utamanya dapat berbeda antar waktu dan antar lembaga tersebut.

Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967 yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Peran Bulog tersebut dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga dasar untuk melindungi petani padi. Dalam perkembangan selanjutnya, Sebelum tahun 1998, tugas yang diberikan kepada Bulog ditujukan untuk mengendalikan harga produsen dan menjaga stabilitas harga beras konsumen, serta menyediakan stok beras antar waktu dan antar daerah untuk keperluan penyaluran rutin dan cadangan pemerintah untuk keperluan darurat atau keperluan lainnya. Bobot pengendalian harga produsen dan harga konsumen seimbang.

Pengertian harga suatu barang atau jasa adalah suatu tingkatan penilaian yang pada tingkat itu barang yang bersangkutan dapat dipertukarkan dengan barang lain, apapun bentuknya. Sedang Bertil Ohlin berpendapat bahwa perdagangan internasional itu sebenarnya adalah masalah harga jelasnya, perbedaan harga yang menyebabkan timbulnya kegiatan perdagangan internasional oleh karena itu Bertil Ohlin membahas perdagangan internasional mengikuti jalur proses mekanisme. Pembentukan harga yang sudah sendirinya harus menyelidiki faktor-faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, karena harga suatu barang itu terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Perbedaan harga barang tersebut yang menjadi dasar dari timbulnya perdagangan internasional. Menurut Ohlin adalah disebabkan oleh perbedaan komposisi dan proporsi faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ini.

Jadi dapat juga dikatakan bahwa pertukaran atau perdagangan barang atau jasa antar negara dapat terjadi oleh karena beberapa perbedaan faktor-faktor produksi dan kemungkinan-kemungkinan mengkombinasikannya dan perbedaan tersebutlah yang merupakan sebab dari perbedaan harga yang kemudian menyebabkan timbulnya kegiatan perdagangan interregional ataupun internasional. Akan tetapi perdagangan internasional itu pun akan berpengaruh pada tingkat harga. Perdagangan internasional mempunyai tendensi bahwa tingkat-tingkat harga itu kemudian akan menjadi sama proses penyamaan tingkat harga ini akan berlangsung dengan lebih cepat lagi bilamana dalam perdagangan

internasional tidak terdapat rintangan-rintangan yang membatasi perdagangan internasional seperti adanya biaya dan cukai serta ongkos transportasi. Jadi perdagangan bukan saja bertendensi untuk mempersamakan harga barang melainkan juga mempersamakan harga faktor produksi. (Sobri, 2001 : 42)

Kebutuhan masyarakat di Indonesia yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, dalam hal ini pangan dapat dipenuhi oleh komoditi beras. Peranan beras tidak dapat dengan mudah digantikan oleh barang substitusi lainnya, hal tersebut dikarenakan beras mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai status sosial bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu penyediaan beras untuk kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan yaitu dengan persediaan beras dalam negeri, apabila persediaan beras dalam negeri kurang, maka impor sangat diperlukan.

Jumlah permintaan beras dipengaruhi oleh banyak faktor tapi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada faktor-faktor antara lain, jumlah penduduk, produksi beras, harga beras dalam negeri, dan pendapatan perkapita. Yang harus diperhatikan adalah jumlah penduduk(X1) karena besar kecilnya jumlah penduduk akan menentukan juga jumlah permintaan beras. Banyak orang memperkirakan bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk didunia yang tetap tinggi setiap tahun sementara lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian semakin sempit, sedangkan permintaan akan kebutuhan beras meningkat, maka impor beras sangat sangat dibutuhkan (Tambunan, 2003 : 175).

Produktivitas (X2) sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang jasa yang produksi) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah) yang di pakai untuk dapat menghasilkan suatu produksi dan apabila suatu produktivitas itu kecil maka produksi juga akan berkurang(Swastha, 1991:281). Faktor lain yang dapat menyebabkan meningkatnya impor beras adalah jika terjadi kenaikan pada harga beras (X3) lewat efek harga dunia yang menyebabkan permintaan beras lokal menurun, ditambah lagi dengan musim kemarau yang terjadi di beberapa daerah (Tambunan, 2003 : 204).

Bertil Ohlin berpendapat bahwa perdagangan internasional itu sebenarnya adalah masalah harga, perbedaan harga internasional(X4) yang menyebabkan timbulnya kegiatan perdagangan internasional oleh karena itu Bertil Ohlin membahas perdagangan internasional mengikuti jalur proses mekanisme. Pembentukan harga yang sudah sendirinya harus menyelidiki faktor-faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi

permintaan dan penawaran, karena harga suatu barang itu terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Perbedaan harga barang tersebut yang menjadi dasar dari timbulnya perdagangan internasional jadi harga internasional sangatlah berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran suatu barang (Sobri 2001:42).

METODE PENELITIAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Bagi bangsa Indonesia beras memiliki peranan penting bagi masyarakat, di mana beras berfungsi sebagai konsumsi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang lebih dominan dalam mengatur perberasan nasional. Setelah terjadinya swasembada beras pada tahun 1984 yang mengakibatkan produksi beras dalam negeri berkurang pada setiap tahunnya sehingga menyebabkan indonesia harus mengimpor beras dari luar negeri.

Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Impor Beras di Indonesia Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dipergunakan adalah variabel Jumlah Penduduk, Produktivitas , Harga Beras Lokal, Harga Beras Internasional, dan Impor Beras sebagai variabel terikat. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu times series yang diambil selama 15 tahun. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah regresi linier berganda menggunakan Uji F dan Uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis Secara Simultan

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat maka digunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F sesuai dengan hasil perhitungan SPSS (*Statistical Program For Social Science*) ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Hasil perhitungan Uji F, Variabel Bebas Terhadap Impor Beras di Indonesia.

	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	F Tabel
Regresi	14160274888560	4	3540068722140	7,45	3,48
Residual	4750355524057,8	10	475035552405,8		
Total	189110630412618	14			

Sumber: Data diolah

$$\begin{aligned}
 F_{hitung} &= \frac{\text{Mean Square Regresi}}{\text{Mean Square Residual}} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Regresi}}{\text{Kuadrat Tengah Residual}} \\
 &= \frac{3540068722140}{475035552405,8} \\
 &= 7,45
 \end{aligned}$$

Karena $F_{hitung} = 7,45$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,48$ pada tingkat $\alpha = 5 \%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk, Produktivitas, Harga Beras Lokal dan Harga Beras Internasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap Impor Beras di Indonesia atau setidaknya salah satu variabel tersebut mampu memberikan sumbangan terhadap Impor Beras di Indonesia.

Uji Hipotesis Secara Parsial

Tabel 2 : Hasil Perhitungan Uji t

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Standart Error	t-hitung	t tabel	r ² parsial
X1 Jumlah Penduduk	-61,403	44,406	-1,383	2,228	0,161
X2 Produktivitas	826735,8	2878155	2,872	2,228	0,452
X3 Harga Beras Lokal	891,247	385,910	2,309	2,228	0,348
X4 Harga Beras Internasional	3535,011	910,863	3,881	2,228	0,601

Sumber : Data diolah

Untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan uji t, untuk melihat ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikatnya, dapat dianalisa melalui uji t dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara Jumlah Penduduk (X_1) terhadap Impor Beras di Indonesia (Y)

Berdasarkan perhitungan diperoleh t_{tabel} sebesar $2,228 \geq t_{hitung}$ sebesar $-1,383$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga kesimpulannya secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Dikarenakan bahwa menurut penelitian Sawit, (2007:03) menjelaskan bahwa kenaikan jumlah penduduk bukanlah penyebab utama timbulnya impor beras di indonesia. Penyebab timbulnya impor beras di yaitu dikarenakan pada tingginya harga beras lokal yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung memilih beras yang lebih

murah sehingga kurangnya produktivitas pertanian akibatnya produksi beras dalam negeri berkurang.

Selain itu menurut Hasil penelitian dari Simatupang dan Timmer (2008 : 4-5) Ketergantungan impor beras di Indonesia selama ini rasanya lebih dikarenakan produksi dalam negeri yang terbatas, pengaruh dari perdagangan internasional atau yang jelas bukan karena motivasi keuntungan dalam perdagangan luar negeri. Nilai r^2 partial sebesar 0,161 bahwa variabel Jumlah penduduk dapat menerangkan variabel Impor Beras di Indonesia sebesar 16,1 % sedangkan sisanya 83,9 % diterangkan variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

- b. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara Produktivitas (X_2) terhadap Impor Beras di Indonesia (Y)

Berdasarkan perhitungan diperoleh $t_{tabel} 2,228 \leq t_{hitung} 2,872$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga kesimpulannya secara parsial Produktivitas berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Nilai r^2 partial sebesar 0,452 bahwa variabel Produktivitas dapat menerangkan variabel Impor Beras di Indonesia sebesar 45,2 % sedangkan sisanya 54,8 % diterangkan variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

- c. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara Harga Beras Lokal (X_3) terhadap Impor Beras di Indonesia (Y)

Berdasarkan perhitungan diperoleh $t_{tabel} 2,228 \leq t_{hitung} 2,309$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga kesimpulannya secara parsial Harga Beras Lokal berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Nilai r^2 partial sebesar 0,348 bahwa variabel Harga Beras Lokal dapat menerangkan variabel Impor Beras di Indonesia sebesar 34,8 % sedangkan sisanya 65,2 % diterangkan variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

- d. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara Harga Beras Internasional (X_4) terhadap Impor Beras di Indonesia (Y)

Berdasarkan perhitungan diperoleh $t_{tabel} 2,228 \leq t_{hitung} 3,881$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga kesimpulannya secara parsial Produktivitas berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Nilai r^2 partial sebesar 0,601 bahwa variabel harga beras Internasional dapat menerangkan variabel impor beras di Indonesia sebesar 60,1 % sedangkan sisanya 39,9 % diterangkan variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan, variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara nyata terhadap Impor beras di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengimpor beras bukan di dasarkan pada jumlah penduduk yang semakin meningkat atau bertambah. Pemerintah mengambil jalan tersebut hanyalah untuk memberantas kemiskinan yang ada Indonesia. Karena pada dasarnya tingkat konsumsi penduduk Indonesia sebagian besar bergantung pada beras, sebagian besar pula penduduk Indonesia berada di garis kemiskinan. Maka dari itu pemerintah mengambil solusi untuk mengimpor beras agar penduduk Indonesia dapat tetap mengkonsumsi beras dengan harga yang terjangkau. Tetapi menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, (2005 : 05) dengan judul “Kemiskinan Petani Sebagai Akar Rapuhnya Ketahanan Pangan Nasional”. ternyata tidak sejalan dengan penelitian ini yang menerangkan bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok dikonsumsi dalam jumlah yang banyak karena Jumlah Penduduk Indonesia yang semakin bertambah dan di lain sisi produksi pangan tanah air tidak mengalami pertambahan yang seimbang sehingga pemerintah mengimpor beras dalam jumlah yang besar.

Menurut penelitian jurnal Nurhasanah, (2005 : 04) dengan judul “Kemiskinan Petani Sebagai Akar Rapuhnya Ketahanan Pangan Nasional”. Pertumbuhan Penduduk Indonesia yang cukup tinggi mengakibatkan kecilnya jumlah Produktivitas pertanian di Indonesia. Dikarenakan jumlah lahan yang terseret oleh pemukiman dan industri, sehingga gairah petani tidak ada yang bercocok tanam lagi. Karena kecilnya tingkat produktivitas pertanian di Indonesia maka menimbulkan semakin kecil pula tingkat produksi yang ada. Mengakibatkan pemerintah harus mengambil jalan untuk mengimpor beras. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan, variabel Produktivitas berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa pada saat swasembada beras yaitu dimana produksi beras dalam negeri dapat tercukupi. Akan tetapi pemerintah masih mengimpor beras dikarenakan untuk mengantisipasi apabila terjadinya kenaikan pada harga beras lokal yang mengakibatkan kelangkaan beras dalam negeri.

Menurut Teori Tambunan, (2003 : 204) Faktor lain yang dapat menyebabkan meningkatnya impor beras adalah jika terjadi kenaikan pada harga beras yang

menyebabkan permintaan beras lokal menurun, dikarenakan mahalnnya harga beras lokal. ditambah lagi dengan musim kemarau yang terjadi di beberapa daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian ini secara parsial maupun simultan menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian menurut Jurnal yang dilakukan oleh Sawit, (2007 : 01) dengan judul "Usulan Kebijakan Beras Dari Bank Dunia: Resep Yang Keliru". ternyata sejalan dengan penelitian ini yaitu bahwa naiknya harga beras dalam negeri yang dikarenakan produksi beras yang kurang sehingga terjadinya kelangkaan beras dalam negeri yang menyebabkan pemerintah harus mengimpor beras untuk menambah pasokan beras yang ada.

Menurut Teori Tambunan, (2003 :204)) Faktor lain yang dapat menyebabkan meningkatnya impor beras adalah jika terjadi kenaikan pada harga beras lewat efek harga dunia yang menyebabkan permintaan beras lokal menurun, ditambah lagi dengan musim kemarau yang terjadi di beberapa daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan variabel harga beras internasional berpengaruh secara nyata terhadap impor beras di indonesia. hal ini dikarenakan bahwa beras merupakan suatu komoditi barang yang tidak dapat tergantikan bagi kebutuhan pokok masyarakat di indonesia. Dimana beras juga merupakan barang yang rentan terhadap musim ataupun iklim yang ada. Selain itu juga sistem pertanian di indonesia masih cukup terbilang tradisional. Oleh karena itu pemerintah harus mengimpor beras dari luar negeri yaitu untuk menjaga pasokan beras dalam negeri apabila terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh musim, dll. pustaka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Jumlah Penduduk, Produktivitas , Harga Beras Lokal, dan Harga Beras Internasional berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia dan telah teruji kebenarannya. Sedangkan hasil Uji T, secara parsial hanya variabel bebas Jumlah Penduduk yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Hal ini disebabkan meskipun Jumlah Penduduk mengalami peningkatan atau penurunan tidak mempengaruhi Jumlah Impor Beras di Indonesia. Sedangkan variabel Produktivitas, Harga beras Lokal dan Harga Beras Internasional yang berpengaruh nyata terhadap Impor Beras di Indonesia. Dari ke empat variabel tersebut yang menunjukkan variabel paling dominan terhadap Impor Beras di Indonesia adalah variabel Harga Beras Internasional. Oleh sebab itu, penulis menyarankan perlunya peningkatan Produktivitas Pertanian di Indonesia, sehingga

Produksi Beras di Indonesia juga akan bertambah. Maka tidak akan terjadinya kelangkaan Beras yang menimbulkan Harga Beras lokal juga ikut naik. Jadi pemerintah tidak perlu lagi Mengimpor Beras dari Luar Negeri.

Bagi para petani diharapkan dapat meningkatkan Produktivitas agar produksi beras dalam negeri tidak terjadi kelangkaan. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengimpor beras justru sebaliknya kita dapat mengekspor beras ke Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, 1995, "Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor", PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Arifin, Bustanul, 2005, "Ekonomi Kelembagaan Pangan", Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Bilas, Richards, 1992, "Teori Mikro Ekonomi", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Boediono, 2000, "Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro", Edisi 2, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- _____, 2001, "Ekonomi Internasional Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3", BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Kadariah, 1994, "Ekonomi Mikro", Penerbit LPFE-UI, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, "Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan", Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Nopirin, 1999, "Ekonomi Internasional Edisi 3", BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Nicholson, Walter, 1987, "Mikroekonomi Intermediate dan Penerapannya", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rosyidi, Suherman, 1994, "Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro", DUTA JASA, Jakarta.
- Rosyidi, 1997, "Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro", Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. hal.295
- Rosyidi, Suherman, 2004, "Pengantar Teori Ekonomi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ritonga, dkk, 2000, "Pelajaran Ekonomi", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Smith, Blakeslee, 1995, "Bahasa Perdagangan", ITB, Bandung.
- Soekartawi, 1993, "Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian", Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, "Pengantar Teori Makro Ekonomi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarman, Ari, 1992, "Teori Ekonomi Mikro", Buku 1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Sukirno, 1995, "Pengantar Teori Ekonomi", Edisi kedua, Raka Erfindo Persada, PT, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2004, "Pengantar Teori Mikro Ekonomi", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryana, A, 2003, "Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Pangan Ketahanan Pangan, Yogyakarta.

Tambunan, Tulus, T.H., 2003, “Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia”, Jakarta.